

Penggunaan media sosial dalam membangun reputasi anggota legislatif di Jawa Barat

Diah Fatma Sjoraida¹, Retasari Dewi², Achwan Noorlistyanto Adi³, Adzkia Kirana Dipa⁴

^{1,2,3,4}Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

ABSTRAK

Pada masa pandemi COVID-19 diperlukan optimalisasi penggunaan media komunikasi seperti sosial media oleh pemerintah, termasuk para anggota lembaga legislatif, baik di pusat maupun daerah. Padahal kegiatan ini bisa saja dilakukan dengan menggunakan sosial media dan tidak terdapat resiko dalam pelaksanaan komunikasi pada masa reses. Namun, masih terdapat keterbatasan penggunaan media komunikasi virtual yaitu sosial media oleh lembaga legislatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki penggunaan sosial media oleh anggota legislatif untuk berkomunikasi dalam masa reses pada masa pandemi dalam membentuk reputasi mereka di mata publik secara digital. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, populasi yang akan diteliti adalah anggota legislatif di provinsi Jawa Barat dengan sebanyak 106 orang responden. Hasil penelitian ini anggota legislatif menggunakan akun sosial media berinteraksi atau mengirim pesan kepada masyarakat luas tentang kegiatan politik untuk berkomunikasi secara terbuka dengan publik dengan pesan politik yang dikirim melalui akun sosial media mengundang komunitas untuk berpartisipasi memberikan dukungan dan komentar serta kritik. Penggunaan sosial media dalam komunikasi pemerintah, lebih mudah bagi pemerintah dan masyarakat serta pihak lain yang memiliki kepentingan untuk bernegosiasi dan mencapai sebuah konsensus. Pada penggunaan sosial media untuk berkomunikasi dengan publik, sebaiknya informasi yang disampaikan dengan sasaran informasi diklasifikasikan dengan jelas sehingga dapat menentukan sosial media jenis apa yang akan digunakan.

Kata-kata Kunci: Sosial media; media komunikasi; relasi; reputasi; anggota legislatif Jawa Barat

Social media to build a reputation for legislature members of West Java

ABSTRACT

During the COVID-19 pandemic, the government must optimize communication media such as social media, including legislature members, both at the central and regional levels. This activity by using social media creates zero risks of implementing communication during recess. However, legislative institutions still have limited use of virtual communication media, namely social media. The purpose of this study is to investigate social media use by legislators to communicate during a recess in the covid-19 pandemic era to shape their reputation in the eyes of the public. The method used in this study is quantitative; the population is members of the legislature of West Java province with 106 respondents. This study shows that legislative members use social media accounts to interact or send messages to the broader community about their political activities and communicate openly with the public through social media accounts inviting the community to support and criticize. Thus, government communication by social media establishes a simple connection between the government and the community and other interested parties to negotiate and reach a consensus. The use of social media to communicate with the public is better if the information conveyed with the target of information is categorized to determine what type of social media will be used.

Keywords: Social media; communication media; relation; reputation; West Java legislature

Korespondensi: Dr. Diah Fatma Sjoraida M.Si, Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Email: diah.fatma@unpad.ac.id.

Submitted: February 2021, **Accepted:** April 2021, **Published:** August 2021

ISSN: 2528-6927 (printed), ISSN: 2541-3678 (online). Website: <http://jurnal.unpad.ac.id/profesi-humas>

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 memengaruhi semua aspek kehidupan dari perspektif ekonomi, pendidikan, sosial budaya, dan lainnya. Termasuk dalam komunikasi politik. Di era kebiasaan baru, bidang komunikasi politik seharusnya menyesuaikan bentuk komunikasi virtual dan penggunaan teknologi. Kenaikan aktivitas pencarian informasi terkait COVID-19 pada umumnya disebabkan oleh pernyataan-pernyataan pemerintah yang juga merupakan penyebab adanya perbedaan tren pencarian pada setiap bulannya (Limilia & Pratomawaty, 2020). Peredaran informasi kesehatan, seperti pemberitaan COVID-19 sering diwarni oleh misinformasi dan disinformasi, khususnya di media sosial (Dida et al., 2021). Pada prinsipnya, masyarakat merasakan kekhawatiran mengenai pandemi namun setelah memperoleh informasi, masyarakat cenderung menjadi terbuka pemikirannya (Rohman & Retnasary, 2020). Oleh karena itu dibutuhkan optimalisasi penggunaan media komunikasi seperti sosial media oleh pemerintah, termasuk para anggota lembaga legislatif, baik di pusat maupun daerah.

Keberadaan perangkat media sosial dalam pemerintahan mengubah wajah lembaga dan birokrasi publik global. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah mencoba untuk mengadopsi alat Web 2.0 yang berbeda,

seperti blog, mikroblog, Wiki, jaringan sosial, berbagi multimedia, aplikasi mashup, markup, dunia virtual, dan crowdsourcing (Criado et al., 2013). Setelah bertahun-tahun melakukan eksperimen, pengujian, dan evaluasi, penyebaran media sosial di pemerintahan kini ditujukan untuk menginovasi bagaimana birokrasi publik beroperasi secara internal dan bagaimana mereka berinteraksi dengan publik di luar batas-batas organisasi pemerintah. Saat ini, pemerintah belum memiliki definisi yang komprehensif tentang media sosial. Singkatnya, media sosial dapat didefinisikan sebagai sekumpulan teknologi yang memungkinkan lembaga publik menggunakan konsep Web 2.0 untuk memfasilitasi interaksi dengan warga dan organisasi lain. Semua metode yang ada menunjukkan signifikansi sosial dari teknologi Web 2.0.

Namun, masih terdapat keterbatasan penggunaan media komunikasi virtual yaitu sosial media oleh lembaga legislatif di Jawa Barat. Pada beberapa kasus diketahui sejumlah anggota legislatif justru mengadakan agenda reses di daerah yang berstatus zona oranye alias risiko sedang, dengan alasan telah menerapkan protokol kesehatan dan masyarakat yang datang sudah diberikan masker. Selain itu, durasi pertemuan pun dibatasi. Padahal kegiatan ini bisa saja dilakukan dengan menggunakan sosial media dan tidak terdapat resiko dalam

pelaksanaan komunikasi pada masa reses.

Perlu disadari bahwa memang terdapat beberapa kegiatan komunikasi pada masa reses terhambat di tengah pandemi COVID-19. Ada beberapa daerah yang tidak mengizinkan kegiatan reses anggota legislatif di tengah era *new normal*. Hal ini membuktikan bahwa perlu perubahan cara dan media komunikasi oleh anggota legislatif agar komunikasi politik tetap terselenggara walaupun pada masa pandemisekalipun. Penggunaan perantara sosial oleh pemerintah tidak hanya dapat meningkatkan potensi informasi dan penyediaan layanan, tetapi juga memungkinkan bentuk baru interaksi pengguna-pengguna, dengan demikian mendorong pertukaran opini publik dan pada akhirnya memberitahukan partisipasi kewarganegaraan yang positif. Media sosial pemerintah berpotensi menjadi ruang publik, yang dapat mendorong negosiasi dan interaksi yang ditandai dengan saling pengertian, rasionalitas, dan saling tunjuk, atau sebaliknya, menghalangi mereka, yang mengarah pada peningkatan homogenitas dan polarisasi.

Selama pandemi, pemerintah seharusnya akan cenderung menggunakan media sosial daripada media tradisional. Selama masa istirahat, pemerintah sangat mementingkan penggunaan platform media sosial berdasarkan video dan foto pendek untuk menjaga komunikasi. Sebagai format media sosial yang hidup, video

pendek dapat meningkatkan efisiensi dan intuisi masyarakat dalam menangkap informasi yang ingin disampaikan pemerintah melalui media sosial. Berbagai jenis platform media sosial telah dikomunikasikan oleh pemerintah, salah satunya melalui penggunaan media sosial oleh anggota parlemen saat pandemi meningkat drastis.

Penggunaan sosial media seharusnya dapat digunakan untuk menyesuaikan dengan era kebiasaan baru untuk tetap melanjutkan komunikasi anggota legislatif pada masa reses namun tidak melaksanakan komunikasi langsung melainkan menggunakan sosial media. Menurut survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia 2017, terdapat 25,3% dari penggunaan Internet memiliki tujuan untuk memperbarui informasi di Indonesia. Dengan kata lain, menurut data tersebut, lebih dari 50% pengguna Internet pada kelompok usia produksi menggunakan akses Internet untuk memenuhi kebutuhan informasi mereka. Penelitian tentang media sosial harus fokus pada dampak aktual dan efek aktual dari kelompok yang menggunakan teknologi informasi, diharapkan semakin meningkat pada fase implementasi media sosial berikutnya di pemerintahan, termasuk gagasan untuk mengukur dampak real-time media sosial sebagai sumber inovasi bagi lembaga publik. Sejauh ini, dampak teknologi yang dapat dirasakan dapat berasal dari keterbukaan

birokrasi publik kepada publik, kerja sama dengan lembaga lain dalam proses kebijakan, partisipasi warga dalam pengambilan keputusan politik, memaksimalkan sumber daya untuk pelaksanaan operasi, dan lebih cepat dan lebih efisien. Penyebaran ramah lebih banyak informasi pengguna, dll.

Demokrasi di seluruh dunia menghadapi tantangan terkait partisipasi warga dalam institusi politik, dan teknologi media sosial adalah cara potensial untuk mengubah tren yang semakin negatif ini. Sejumlah besar penelitian telah menekankan kemampuan komunikasi alat media sosial. Pada saat yang sama, analisis media sosial di pemerintahan dapat berfokus pada potensi teknologi ini untuk mempromosikan partisipasi, produksi bersama layanan, dan partisipasi umum dari warga dan otoritas publik. Pengembangan pengalaman mikro yang berkelanjutan yang didedikasikan untuk mempromosikan partisipasi di yurisdiksi atau bidang kebijakan tertentu harus disertai dengan perhatian pada upaya yang lebih umum untuk menggunakan media sosial untuk inovasi demokrasi di pemerintahan. Di sini, konsep seperti inovasi terbuka, inovasi kolaboratif, atau inovasi sosial memberikan label untuk mempelajari pengalaman kerja sama pemerintah dan warga negara.

Komunikasi politik melalui sosial media ini merupakan usaha untuk mengelola reputasi

pemerintah secara *online* yang merupakan salah satu jenis modal terpenting yang termasuk dalam kategori modal tidak berwujud. Reputasi sangat berharga karena menentukan sikap masyarakat terhadap lembaga atau individu. Jika lembaga memiliki reputasi yang baik, nilai psikologisnya akan melebihi nilai materialnya. Masyarakat modern, evaluasi terhadap objek memang telah bergeser dari nilai material menjadi nilai budaya. Penelitian yang dilakukan oleh Petrovici pada tahun 2013 tentang dampak dan efisiensi PR elektronik menemukan bahwa hubungan masyarakat (*public relations*) *online* menciptakan saluran baru yang dapat digunakan lembaga untuk mengkomunikasikan layanan atau produk, sehingga meningkatkan visibilitas mereka di lingkungan virtual (Petrovici, 2014). Teknologi internet tidak hanya mengubah hubungan masyarakat menjadi hubungan masyarakat digital, tetapi yang lebih penting, mengubah monolog menjadi dialog. Dengan menyediakan proses komunikasi dua arah, penggunaan internet oleh departemen hubungan masyarakat suatu organisasi dapat meningkatkan efisiensi komunikasi dengan publik, sehingga memperkuat terjalinnya hubungan dengan publik. Untuk alasan ini, e-PR pada dasarnya adalah tentang hubungan interpersonal dan karena itu memiliki potensi besar sebagai alat komunikasi.

Dengan munculnya internet, menyediakan

berbagai alat baru untuk pembuatan konten, dan alat ini telah mengubah kondisi tradisional manajemen identitas. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki strategi komunikasi dan interaksi yang jelas dengan khalayak melalui sosial media. Lembaga pemerintah dapat membangun identitas ataupun reputasi. Hal ini dapat dilihat sebagai “struktur sosial yang kompleks, baik pribadi maupun sosial, dan komponennya meliputi: siapa kita, bagaimana kita ingin orang lain melihat kita, dan bagaimana mereka sebenarnya memandang kita”. Hal terpenting dalam media *online* adalah menampilkan kesan (*image*) kepada khalayak mengenai kegiatan politik yang dilaksanakan. Dari definisi tersebut, kita dapat melihat bahwa konstruksi aktual identitas digital pemerintah dapat menjadi bagian dari identitas *offline* dan memperkaya identitas *offline*.

Media sosial merupakan saluran atau sarana pergaulan sosial secara *online* di dunia maya (Engkus, Hikmat & Saminnurahmat, 2017), sehingga dapat dikatakan bahwa media sosial telah memasuki ranah kehidupan, mempengaruhi interaksi informal masyarakat, struktur kelembagaan, dan rutinitas profesional (Putra, 2017). Media sosial juga telah dimanfaatkan oleh berbagai tokoh dan kader partai politik untuk mempersuasi masyarakat agar mendukung tokoh dan partai mereka (Pamungkas, 2013). Artinya tokoh dan partai

politik dapat memanfaatkan keberadaan media sosial guna mencapai tujuan kepercayaan khalayak dan reputasi *online*. Singkatnya, saat pemerintah mulai berinteraksi dengan publik di media sosial, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk meninjau secara ketat kerangka evaluasi yang ada berdasarkan pengalaman dan kebutuhan pengguna media sosial pemerintah. Ini akan membantu menginformasikan strategi media sosial dan praktik komunikasi pemerintah, serta memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna media sosial pemerintah. Dengan kata lain, mereka lebih sadar akan kebutuhan untuk meningkatkan derajat interaksi dan partisipasi dengan pemangku kepentingan untuk mencapai partisipasi dua arah. Dalam hal ini, peneliti percaya bahwa lembaga pemerintah menyadari perlunya berinteraksi dengan warga untuk mencapai masyarakat partisipatif, daripada hanya mempublikasikan informasi dan kegiatan pemerintahan melalui jejaring sosial.

Penggunaan sosial media pada masa pandemi merupakan implementasi untuk membantu pemerintah mencapai tujuan kepercayaan khalayak dan reputasi *online* yang akan berdampak pada reputasi *offline*. Pertama, media sosial berpotensi meningkatkan akses warga negara terhadap informasi pemerintah dan mengurangi asimetri informasi antara pegawai pemerintah dan warga negara. Peningkatan transparansi yang didorong

oleh media sosial ini membuka jalan untuk mengendalikan korupsi staf dan menyimpang dari tugas politik, hukum, dan etika mereka dalam arti luas, yang mempromosikan akuntabilitas yang lebih besar secara umum. Kehadiran pemerintah daerah di jejaring sosial sering dianggap sebagai simbol modernitas dan respons terhadap kebutuhan sosial yang berupaya untuk berpartisipasi melalui Internet. Dalam kaitan ini, penggunaan media sosial oleh pemerintah juga diyakini sebagai bentuk partisipasi interaktif. Pertimbangan tersebut menjelaskan alasan banyaknya pemerintah daerah Spanyol yang dianalisis dalam penelitian sebelumnya menggunakan setidaknya satu bentuk media sosial untuk berinteraksi dengan publik. Namun, keberadaan Facebook atau Twitter yang sederhana bukanlah tujuan itu sendiri. Pemerintah daerah harus merumuskan strategi dan mempromosikan komunikasi dua arah antara pemerintah dan warga untuk mendapatkan dan meningkatkan kepercayaan (Haro-de-Rosario, 2018).

Jika para pemimpin politik secara aktif menggunakan media sosial dalam administrasi publik dan kebijakan muncul, peran mereka sebagai perantara di media sosial kemungkinan besar membantu mengatasi kekurangan negara dalam meningkatkan daya tanggap. Pertama-tama, media sosial memungkinkan para pemimpin politik untuk menindak asimetri

informasi dengan pejabat publik dengan melakukan penyuaipan publik kepada pejabat publik dan sering melaporkan kemajuan tindakan administratif, mendorong pejabat publik untuk sengaja mengabaikan tanggung jawab sipil atau melakukan kesalahan. Kedua, media sosial adalah alat yang nyaman bagi para pemimpin politik untuk memerangi asimetri informasi dengan warga dengan membantu memeriksa semua kebutuhan dan persyaratan warga, dan juga merupakan alat yang efektif untuk menginformasikan warga tentang kemajuan tindakan administratif untuk mengambil persyaratan lebih lanjut dan kebutuhan.

Dari perspektif dua prinsip demokrasi, pentingnya kegiatan hubungan masyarakat pemerintah: tanggung jawab pemerintah untuk melaporkan kegiatannya kepada warga negara, dan perlunya dukungan dan partisipasi publik. Kinerja pemerintah yang efektif. Salah satu hal yang menjadi tujuan *public relations* pemerintah. Kegiatannya adalah untuk memenuhi tanggung jawab mereka dengan memberikan informasi dan layanan yang diperlukan kepada khalayak dan menanggapi memenuhi kebutuhan informasi khalayak. Mengingat pentingnya ini, undang-undang tertentu (seperti Undang-Undang Kebebasan Informasi) membebaskan tanggung jawab ini kepada pemerintah untuk memastikan bahwa warga negara memperoleh

informasi pemerintah dan menanggapi permintaan pemerintah secara tepat waktu (Hong, Katerattanakul & Joo, 2008). Sejak media *online* lumrah digunakan, transparansi pemerintah menjadi isu penting. Ketika pemerintah dapat menjangkau lebih banyak khalayak, penyediaan informasi pemerintah akan lebih efektif dan efisien. Biayanya relatif rendah, dan batasan waktu dan tempat juga kecil, Inti dari media *online* dianggap memberikan akses interaktif warga negara ke informasi pemerintah, dengan demikian memfasilitasi berbagi informasi dan partisipasi mereka. Proses pengambilan keputusan pemerintah. Selain itu, pemerintah bisa menjawab pertanyaan khalayak memberikan umpan balik secara cepat dalam waktu. Dalam hal ini, pemerintahan dalam menggunakan media online berpotensi menjalin interaksi dan komunikasi antara warga dengan pemerintah yang diwakilinya demokrasi.

Membangun saluran komunikasi fungsional untuk menyebarkan informasi kepada warga, dan memungkinkan warga untuk memantau dan berfungsi interaksi. Untuk memaksimalkan sumber daya, usaha untuk fokus pada khalayak yang berpotensi mendukung, dan menyampaikan nilai, layanan, dan dampak sikap strategis tentang komunikasi politik organisasi pemerintah yaitu anggota legislatif sebagai representatif pemerintah dalam mencapai komunikasi dua arah dan

efektif agar terjadi perubahan yang positif yaitu partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan pemerintah melalui sosial media demi reputasi pemerintah.

Terdapat kelebihan dalam penggunaan sosial media dalam komunikasi pemerintah, lebih mudah bagi pemerintah dan masyarakat serta pihak lain yang memiliki kepentingan untuk bernegosiasi dan mencapai sebuah konsensus. Dengan membuat, menonton, dan berbagi video pendek dan foto. Selain meningkatkan Efektivitas pesan yang disematkan dalam video pendek, pesan yang lebih jelas bisa. Umpan balik informasi lebih lanjut, ini merupakan saluran penting untuk informasi lebih lanjut. Biasanya, transmisi informasi dan warga negara *platform* video pendek tepat waktu dan efektif. Misalnya, ada gambar dan video di sosial media yang ditemukan membantu mempromosikan kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk menyelesaikan masalah pada daerah tersebut. Secara khusus, warga bisa lebih memahami niat pemerintah setelah menonton video, berperilaku tepat dan berpartisipasi aktif Bantuan untuk mengekang aktivitas COVID-19.

Berdasarkan paparan diatas, maka peneliti tertarik untuk membahas penggunaan sosial media oleh anggota legislatif di Jawa Barat pada masa pandemi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki penggunaan sosial media

oleh anggota legislatif untuk berkomunikasi dalam masa reses pada masa pandemi dalam membentuk reputasi mereka di mata publik secara digital.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Menurut Sugiyono, metode kuantitatif adalah metode yang digunakan untuk mempelajari populasi atau sampel tertentu, menggunakan alat penelitian untuk pengumpulan data, dan melakukan analisis data kuantitatif atau statistik (Sugiyono, 2014). Metode ini menggunakan variabel terukur dari bentuk angka dan analisis statistik. Hasil penelitian kuantitatif Akurat karena didukung bukti konkret di lapangan. Penelitian bersifat kuantitatif deskriptif adalah sebuah studi yang akan menjelaskan dengan secermat mungkin Seorang individu, kondisi, gejala atau kelompok tertentu. Tujuan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kuantitatif untuk menjelaskan keadaan di mana investigasi akan dilakukan dengan dukungan. Penelitian literatur untuk lebih memperkuat analisis peneliti Kesimpulan, menarik hasil penelitian dari hasil perhitungan Kemudian mengemukakan indikator variabel penelitian dalam bentuk tertulis oleh peneliti.

Populasi adalah suatu wilayah yang digeneralisasikan, meliputi: objek / topik dengan

kualitas dan karakteristik tertentu, dan peneliti mengidentifikasi objek / topik tersebut untuk penelitian dan kemudian menarik kesimpulan (Sugiyono, 2014). Dalam penelitian ini populasi yang akan diteliti adalah anggota legislatif di provinsi Jawa Barat. Menurut Sugiyono, *non-probability sampling* merupakan suatu teknik tidak bisa memberikan kesempatan yang sama untuk setiap elemen. Anggota populasi yang akan dipilih digunakan sebagai sampel. Sampel pada penelitian ini adalah *quota sampling* yang merupakan suatu teknik penentuan sampel populasi yang mempunyai karakteristik tertentu sehingga memenuhi kuota yang dipersyaratkan (Sugiyono, 2014). Terdapat sebanyak 106 orang responden yang merupakan anggota legislatif di Jawa Barat. Populasi tidak dianggap, tetapi dibagi menjadi beberapa kategori. Pengambilan sampel dilakukan dengan memberikan kuorum tertentu kepada kelompok, dan pengumpulan data dilakukan langsung di unit pengambilan sampel. Setelah kuota tercapai, pendataan akan dihentikan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: survei kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan serangkaian pertanyaan kepada narasumber untuk dijawab. Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup atau terbuka, yang dapat diberikan langsung kepada responden, atau

dikirim melalui surat atau Internet (Sugiyono, 2014). Jenis pertanyaan dalam penelitian ini adalah pertanyaan tertutup yaitu pertanyaan atau pernyataan yang memberikan alternatif jawaban, sehingga responden hanya perlu memilih salah satu jawaban yang diberikan. Dalam penelitian ini kuisisioner akan dibagikan kepada responden. Responden merupakan anggota legislatif di Jawa Barat yang disebarakan melalui *google form*.

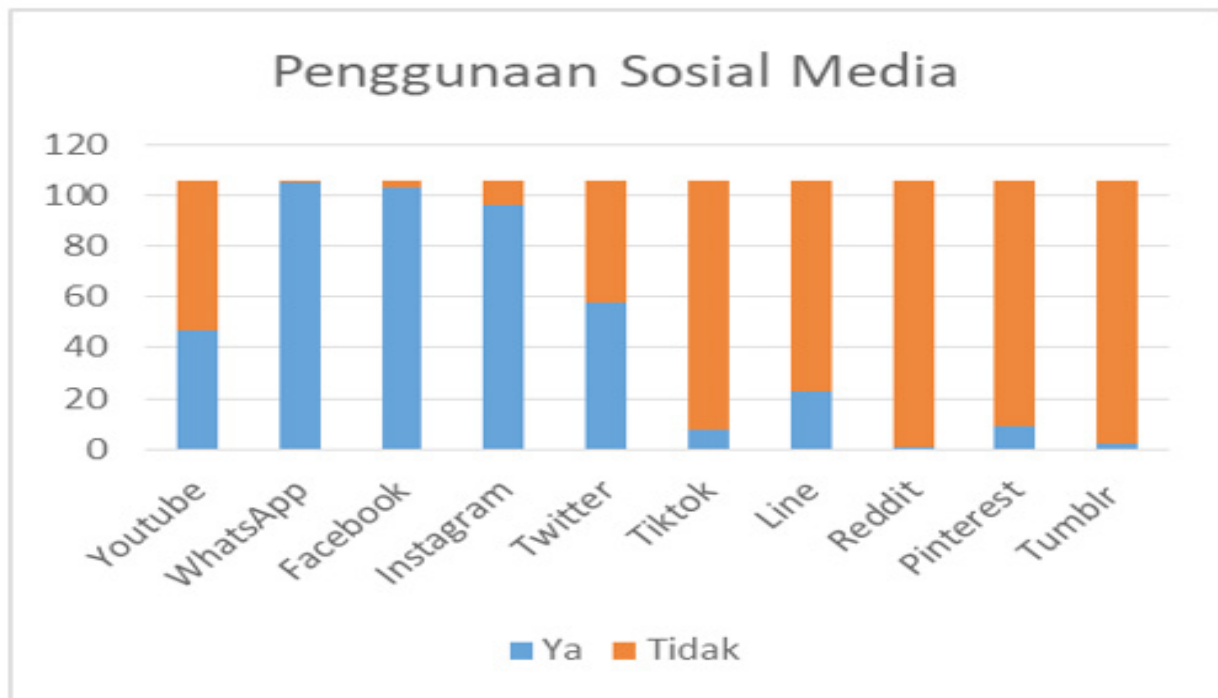
Penelitian ini juga menggunakan data kepustakaan dilakukan dengan mempelajari literatur atau dokumen dan membaca buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Menurut Nazir, studi kepustakaan mencakup teknik pengumpulan data dengan mempelajari buku, dokumen, catatan dan laporan yang berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan (Nazir, 1998). Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kuantitatif, analisis deskriptif adalah jenis data statistik yang menganalisis data dengan mendeskripsikan atau mendeskripsikan data yang dikumpulkan sebagaimana adanya, tanpa membuat kesimpulan umum atau generalisasi.

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data. Dengan mendeskripsikan atau mendeskripsikan data yang sudah ada. Kumpulkan apa adanya, tanpa membuat kesimpulan apa pun cocok untuk generalisasi atau generalisasi. Statistik

deskriptif mencakup pengklasifikasian data variabel berdasarkan kelompoknya masing-masing tidak beraturan sejak awal dan mudah dijelaskan oleh mereka yang membutuhkan informasi tentang status variabel ini. Selain statistik deskriptif digunakan untuk menyajikan informasi dengan cara ini sehingga data. Hasil penelitian bisa dimanfaatkan orang lain perlu. Penelitian tentang populasi (tanpa pengambilan sampel) jelas akan menggunakan statistik deskriptif dalam analisisnya. Namun, jika sampel dipelajari, analisis dapat menggunakan statistik deskriptif atau inferensial. Statistik deskriptif dapat digunakan ketika peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel tetapi tidak ingin menarik kesimpulan yang berlaku untuk populasi sampel (Sugiyono, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan dengan sebanyak 106 orang responden anggota legislatif di Jawa Barat. Penggunaan sosial media oleh anggota legislatif untuk melakukan komunikasi dalam masa reses. Namun pada masa pandemi kegiatan reses yang merupakan komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, dan merupakan kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin dianjurkan menggunakan media sosial secara virtual untuk mengurangi resiko dan mematuhi protokol



sumber: Data Peneliti, 2020

Gambar 1 Penggunaan Sosial Media oleh anggota legislatif

kesehatan selama masa pandemi.

Terlihat media sosial yang paling tinggi digunakan adalah WhatsApp, sebanyak 105 responden menjawab menggunakan media sosial tersebut. Kemudian di peringkat kedua terdapat Facebook digunakan sebanyak 103, kemudian Instagram digunakan sebanyak 96, disusul oleh penggunaan Twitter yang digunakan oleh anggota legislatif sebanyak 58 responden. Sosial media yang paling sedikit digunakan adalah Tumblr terdapat 2 responden menggunakan dan Reddit hanya terdapat 1 responden yang menggunakan sosial media tersebut. Tingginya penggunaan Facebook oleh anggota legislatif, sejalan dengan pernyataan bahwa Facebook merupakan media sosial

handal untuk kepentingan *political marketing* (Juditha, 2015), dan Facebook dinilai sebagai media sosial yang “merakyat”(Sumartono, 2019).

Penulis menemukan bahwa penggunaan sosial media WhatsApp, Facebook dan Instagram. Ketiga media sosial ini digunakan hampir seluruh responden sebagai media komunikasi. Perkembangan komunikasi ditandai dengan penggunaan media baru sebagai media komunikasi, termasuk sosial media. Komunikasi terbuka awalnya terbatas pada proses interaktif, tatap muka sekarang dapat dilakukan secara *online* melalui internet. Variasi rata-rata media sosial sedang tumbuh dan sangat diminati responden untuk melakukan

komunikasi selama masa reses merupakan ketiga sosmed tertinggi diatas. Media sosial sebagai alat komunikasi memainkan peran membawa orang (penggunanya) untuk berpartisipasi dengan berpartisipasi secara aktif dan membuka opini, bagus untuk berbagi informasi atau memberi balasan *online* tepat waktu cepat.

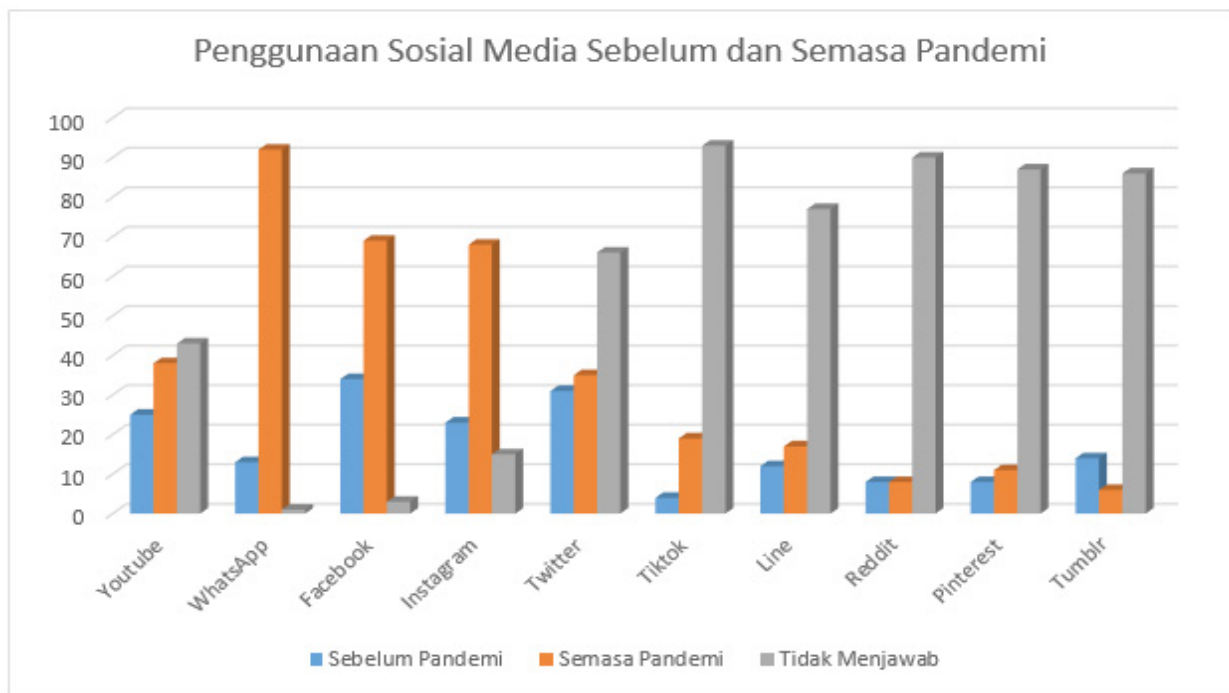
Media sosial seperti Facebook awalnya dikaitkan dengan masalah pertemanan. Namun, pada saat itu hal itu mulai sangat menyinggung dunia kebijakan kekuasaan pemerintah atau negara bagian. Perkembangan teknologi komunikasi memiliki pengaruh yang baik terhadap proses politik. Padahal, kemajuan komunikasi digital melalui media digital akan membawa semangat baru demokrasi.

Dalam perkembangannya, media sosial menjadi ukuran yang efektif proses komunikasi politik. Komunikasi yang dilakukan merupakan proses informasi politik kutipan yang relevan diberikan dari satu bagian sistem politik ke bagian lain, dan antara sistem sosial dengan sistem politik. Proses ini sedang berlangsung *up to date* dan berisi juga pertukaran informasi antara individu dan kelompok mereka di semua tingkatan. Melalui komunikasi di sosial media anggota legislatif dan masyarakat berhubungan atau berhubungan dengan pesan politik dan aktor politik kekuasaan, manajemen dan politik pemerintah.

Dari data tersebut terlihat jelas bahwa anggota legislatif menggunakan akun sosial media berinteraksi atau mengirim pesan kepada masyarakat luas tentang kegiatan politik untuk berkomunikasi secara terbuka dengan publik dengan pesan politik yang dikirim melalui akun sosial media mengundang komunitas untuk berpartisipasi memberikan dukungan dan komentar serta kritik. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, media sosial bersifat interaktif, memungkinkan publik memberikan tanggapan langsung kepada kegiatan politik lembaga legislatif. Umpan balik bisa positif dan negatif.

Namun terdapat beberapa sosial media yang nampaknya belum lumrah untuk digunakan oleh anggota legislatif dalam mengkomunikasikan kegiatannya, yaitu Reddit, Pinterest dan Tumblr. Tumblr sendiri merupakan media sosial dan social sharing. Faktanya, Tumblr tidak sepopuler media sosial dan Weibo (seperti blog atau Twitter). Namun, konsep yang diberikan kepada pengguna jauh lebih sederhana dan tanpa kerumitan. Reddit ibarat forum untuk berbagi berbagai informasi yang mirip dengan Kaskus dan bahkan Steemit.

Terdapat perbedaan tingkat penggunaan sosial media oleh anggota legislatif pada masa sebelum pandemi COVID-19 dan semasa pandemic, pada gambar 2. Terdapat sosial media Youtube digunakan paling tinggi disaat masa



sumber: Data Peneliti, 2020

Gambar 2 Perbandingan penggunaan Sosial Media anggota legislatif Sebelum dan Semasa Pandemi

pandemi digunakan sebanyak 38 dari sebelum pandemi pada angka 25 orang. Kemudian, Facebook pada angka 69 pada masa pandemi setelah sebelumnya hanya digunakan responden sebanyak 34 orang, disusul oleh Instagram 68 digunakan semasa pandemi dan sebelum pandemi digunakan sebanyak 23 orang oleh responden yang merupakan anggota legislatif dalam komunikasi untuk menjaga pertanggung jawaban kepada konstituen.

MediasosialsepertiInstagramdanFacebook memiliki peran dan pengaruh yang besar dalam meningkatkan perhatian publik khususnya pada politik jika dilakukan komunikasi di sosial media oleh tokoh politik. Banyaknya perbincangan di situs media sosial tersebut

menandakan kemunculan domain ketertarikan publik baru mengenai kegiatan politik. Pemerintah dapat mempromosikan transparansi dengan secara aktif mengungkapkan informasi tentang tindakan dan keputusan mereka, dan kemudian mengizinkan masyarakat untuk mengakses, memantau dan mengevaluasinya.

Dari sudut pandang masyarakat, transparansi pemerintah dilihat ketika informasi pemerintah tersedia untuk umum. Namun, meskipun informasi tersedia, masyarakat tidak akan menerima transparansi pemerintah sampai mereka secara efektif diberi tahu tentang tindakan dan keputusan pemerintah. Dalam konteks ini, transparansi pemerintah dapat dicirikan sebagai sejauh mana publik dalam

sebuah negara memiliki akses ke lembaga dan pejabat pemerintah serta mendapatkan informasi tentang kegiatan pemerintah. Media sosial dapat membantu lembaga dan pejabat pemerintah menjadi lebih transparan dengan terus memberi tahu mereka tentang kegiatan dan keputusan pemerintah melalui lembaga legislatif.

Anggota legislatif menggunakan media sosial untuk berinteraksi satu sama lain dan sebagai representasi lembaga pemerintah dan / atau pejabat untuk berbagi informasi pemerintah. Bersama-sama, media sosial dan perangkat yang nyaman seperti *smartphone* menjadi media komunikasi dan memungkinkan interaksi yang sering dengan pemerintah. Selain itu, hubungan *many-to-many* yang ditampilkan di media sosial berkontribusi pada berbagi pengetahuan antar publik - tidak hanya mereka yang menggunakan media sosial pemerintah, tetapi juga mereka yang bukan pengguna yang terhubung melalui media sosial dengan publik lain pada umumnya. Dengan cara ini, publik akan cenderung melihat transparansi yang lebih besar dalam pemerintahan.

Kepercayaan warga negara pada pemerintah dapat dibuat, dipelihara, atau dipulihkan dengan menerapkan konsep kepercayaan ini bersama dalam menghasilkan kepercayaan: kepercayaan berbasis institusi, kepercayaan berbasis proses, dan kepercayaan berbasis sifat.

Terlepas dari perbedaan konseptual mereka, semua sarjana ini sepakat tentang pentingnya informasi (dan transparansi) dalam menjelaskan bagaimana publik membangun kepercayaan pada pemerintah. Menyajikan lebih banyak informasi mengenai kegiatan politik membantu meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah.

106 responden yang merupakan anggota legislatif di Jawa Barat merupakan pengguna media sosial dan terjadi peningkatan penggunaan semasa pandemi. Temuan menunjukkan bahwa media sosial di pemerintahan memungkinkan warga untuk memiliki akses yang lebih mudah ke pemerintah dan informasi yang lebih baik tentang peristiwa terkini, kebijakan atau program, meningkatkan persepsi mereka tentang transparansi dalam pemerintahan. Penggunaan media sosial oleh perwakilan pemerintahan membantu warga mendapatkan informasi yang lebih baik tentang urusan pemerintahan karena tahap awal penggunaan media sosial di pemerintahan berfokus pada transparansi data untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap data dan proses pemerintahan. Media sosial juga dapat mendekatkan lembaga dan pejabat pemerintah dengan warga dalam arti bahwa mereka dapat diakses melalui perangkat yang nyaman seperti *smartphone* dan tablet. Sering berkomunikasi dengan warga tentang apa yang dilakukan pemerintah untuk kepentingan terbaik mereka dapat meningkatkan hubungan

pemerintah-warga, dan ini juga dapat menyebabkan kepercayaan warga terhadap pemerintah.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa media sosial dapat digunakan oleh anggota legislatif pada masa pandemi dan masa adaptasi kebiasaan baru agar tetap dapat berkomunikasi secara terbuka dan dua arah dengan masyarakat. Kemudian keberlangsungan komunikasi ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Transparansi anggota legislatif merupakan perantara yang signifikan antara penggunaan media sosial pemerintah dan kepercayaan mereka pada pemerintah, hubungan langsung antara penggunaan media sosial pemerintah oleh warga negara dan kepercayaan mereka pada pemerintah tidaklah relevan. Artinya media sosial dalam suatu pelaksanaan politik oleh aktor politik hanya dapat meningkatkan kepercayaan warganya terhadap pemerintah dengan mencapai beberapa hasil yang diharapkan, salah satunya adalah transparansi komunikasi antara masyarakat dan aktor politik sebagaimana dibuktikan dalam penelitian ini. Penggunaan media sosial dalam penyelenggaraan politik dimaksudkan tidak hanya untuk meningkatkan transparansi pemerintahan, tetapi juga partisipasi dan kerjasama publik dalam penyelenggaraan dan pengambilan kebijakan oleh anggota legislatif sebagai bagian dari pemerintahan.

Penggunaan media sosial telah menghasilkan perubahan besar dalam cara individu dan organisasi berkomunikasi dan bertukar informasi, dan akan memberikan peluang bagi anggota legislatif untuk mencapai tujuan demokrasi dasar, yaitu transparansi, dan partisipasi. Dalam artikel ini, peneliti menemukan bahwa sebagian besar penggunaan media sosial oleh anggota legislatif sebagai aktor politik adalah untuk tujuan simbolis dan ekspresif dalam menjaga komunikasi dalam masa reses yang sedikit mengalami penyesuaian dikarenakan pandemi. Anggota legislatif menggunakannya karena media sosial bukan hanya alat untuk transparansi demokrasi dan partisipasi warga, tetapi juga alat untuk ekspresi diri, pertukaran gerakan simbolik, dan menawarkan layanan sebagai tokoh publik dan representatif pemerintah.

Media sosial adalah alat untuk dialog dan kolaborasi, dan jenis interaksi ini melayani tujuan demokrasi, media sosial menekankan dialog dan kolaborasi dalam berbagai tingkatan (Kietzmann et al., 2011). Komunikasi pada platform sosial media dapat mengacu pada kolaborasi, partisipasi, dan interaksi diskusi atau aktivitas eksternal. Diskusi yang mencakup pengumuman tentang pertemuan yang mengundang warga untuk berdialog tentang masalah tertentu; dan pengumuman lain yang membutuhkan partisipasi dalam kerjasama

pemerintah dan masyarakat.

Media sosial menjadi bagian penting dalam penyebaran informasi di era digital karena mempermudah komunikasi yang dapat melampaui waktu, jangkauan, dan bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja (Subekti, 2020). Dalam penggunaan media sosial oleh anggota legislatif adalah kemampuan mereka untuk mengoperasikan saluran penyebaran informasi mereka sendiri berarti mereka dapat mengontrol informasi yang mereka gunakan untuk menggambarkan diri mereka sendiri. Ini adalah aset besar bagi organisasi karena mereka dapat mengekspresikan pendapat mereka dan menciptakan gambaran tentang bagaimana mereka ingin dianggap.

Terkadang media sosial kurang digunakan untuk kolaborasi dan interaksi daripada alat untuk ekspresi diri dan perilaku simbolik. Dilihat dari jenis penggunaan media sosial oleh anggota legislatif diketahui bahwa anggota legislatif dapat memahami bagaimana karakteristik dari sosial media yang mereka gunakan serta memilah informasi ke dalam kategori komunikasi yang berbeda.

Adanya penggunaan sosial media ini memperluas kerangka demokrasi yang digunakan untuk mengevaluasi interaksi sosial pemerintah untuk mencakup berbagai bidang interaksi, yang melibatkan komunikasi simbolik, ekspresi diri, dan posisi politik. Penelitian ini

mengevaluasi sejauh mana anggota legislatif menggunakan jenis sosial media dalam proses komunikasi. Karena anggota legislatif juga menjalankan tujuan *e-government* yang demokratis dan politis, pertimbangan khusus harus diberikan pada jenis informasi yang didistribusikan dalam pesan melalui media ini. Diharapkan komunikasi di media sosial melibatkan realitas komunikasi yang murni simbolis dan ekspresif.

Walaupun Baudrillard mengatakan reproduksi realitas tidak merepresentasikan realitas, namun bersifat simulasi, yaitu duplikasi yang mengandung distorsi, sehingga yang ada hanya lah citra (*simulacra*) (Jaya, 2017). Pembentukan citra melalui branding merupakan hal yang penting bagi politisi. Salah satu media yang memungkinkan untuk membentuk *branding* adalah media sosial (Anshari & Prastya, 2014). Aktivitas PR politik dalam melakukan branding dan mencitrakan seorang tokoh, dapat dilakukan di semua lini media (Rusmulyadi & Hafiar, 2018), termasuk media sosial.

Terdapat penelitian yang menyatakan bahwa salah satu motif di balik penggunaan media sosial, seperti Instagram adalah motif eksistensi (Permatasari & Trijayanto, 2017). Salah satu fasilitas instagram yang dapat membantu menambah kedekatan antara tokoh dengan pendukung adalah "*Like*". Memberikan

simbol *like* pada komentar *follower* dapat menimbulkan perasaan dihargai dan diapresiasi oleh politisi yang dikomentarnya (Mudrikah, 2020). Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa Instagram merupakan salah satu media sosial yang dapat digunakan untuk pembentukan reputasi.

Komunikasi politik melalui media sosial telah digunakan sektor publik, dan dampaknya yang menguntungkan pada warga negara mengungkapkan peluang baru untuk merangsang demokrasi dalam skala global, mempromosikan demokrasi, dan memberikan solusi bijak untuk masalah publik (Criado et al., 2013). Jadi sebenarnya media sosial dapat berkontribusi untuk memperluas pengaruh menguntungkan dari sektor publik pada warga negara. Media sosial sebagai alat untuk memperluas pengaruh yang bermanfaat bagi warga negara dapat dibagi menjadi dua aspek: mengontrol transparansi dan rasa tanggung jawab staf yang menyimpang dari tugasnya; partisipasi dan tinjauan untuk mendorong warga berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan dan domain publik.

Jika para anggota legislatif sebagai salah satu bagian dari pemimpin politik secara aktif menggunakan media sosial dalam administrasi dan kebijakan publik, peran perantara mereka di media sosial kemungkinan besar dapat membantu mengatasi masalah peningkatan

kecepatan *respons* di masyarakat: pertama, media sosial memungkinkan para pemimpin politik untuk berinteraksi dengan publik. Pejabat publik dapat melaporkan kemajuan tindakan administratif, pejabat publik dapat dicegah untuk melakukan secara sengaja atau keliru mengabaikan tugas-tugas urusan sipil. Kedua, media sosial adalah media yang nyaman bagi para pemimpin politik untuk memerangi asimetri informasi dengan warga dengan membantu memeriksa semua kebutuhan dan tuntutan warga, dan juga merupakan alat yang efektif untuk menginformasikan warga tentang kemajuan tindakan administratif untuk mengambil kebutuhan lebih lanjut.

Sebuah pernyataan menyebutkan bahwa jika aktivitas atau postingan yang disampaikan dinilai positif maka masyarakat pun memberi *like* atau komentar yang positif (Sumartono, 2019). Jika sebuah postingan menarik perhatian masyarakat, maka akan membuka peluang untuk menjadi viral. Konten viral di internet merefleksikan peran baru media digital (Hartiana, Setyarinata & Nugraheni, 2020). Melalui viralisasi sebuah postingan, tak jarang akan menghasilkan popularitas dan reputasi tertentu bagi pelaku postingan, termasuk reputasi negatif manakala sebuah postingan diketahui memiliki unsur misinformasi dan disinformasi.

Ketidaksesuaian informasi di media

sosial antara aktor politik dan masyarakat merupakan sebuah hal yang harus dilawan dan diperjuangkan. Masyarakat melalui sosial media dapat mengajukan pertanyaan administrasi sipil kepada aktor politik, dan mereka juga dapat digunakan sebagai alat untuk sering menanyakan pendapat mereka. dan kemajuan terkait tindakan administratif politik. Secara keseluruhan, munculnya penggunaan aktif media sosial oleh para aktor politik memberikan peluang bagi arus informasi tanpa hambatan di antara para aktor politik publik, dan warga negara, sehingga memberikan petunjuk untuk menyelesaikan masalah. Tantangan untuk memecahkan asimetri informasi dan mencapai responsivitas dalam mendukung penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang demokratis.

Sejak pandemi COVID-19, beberapa negara (termasuk Indonesia) telah menerapkan kebijakan era kebiasaan baru. Pemerintah bisa menjalankan tugasnya dengan menerapkan cara yang sesuai dengan protokol kesehatan. Oleh karena itu, semua acara publik belum diperbolehkan, kebiasaan baru adalah solusi untuk diadopsi dalam menghadapi pandemi yang dapat terintegrasi dengan program pelayanan pemerintah kepada warga negara yang membutuhkan dan tidak mengurangi perhatiannya pada penyediaan layanan publik salah satunya di bidang politik.

Media komunikasi yang digunakan dalam

komunikasi krisis terkait pandemi ini dilakukan melalui media *online* dan media sosial. Hampir seluruh prinsip komunikasi krisis diaplikasikan dalam menghadapi pandemik COVID-19 ini (Venus et al., 2020). Sayangnya, pesatnya penetrasi media sosial dan berbagai aplikasi digital lain belum diikuti oleh tingkat kompetensi literasi digital yang mumpuni (Rahmawan, 2019)

Sehingga berbagai informasi hoaks pun mulai muncul dalam media sosial yang dikaitkan dengan COVID-19 sehingga membuat orang menjadi lebih khawatir (Indriani & Prasanti, 2020). Oleh karena itu, media sosial juga dapat digunakan untuk mengkonter sebuah pesan yang menyesatkan misalnya dalam konteks kampanye untuk perubahan sosial dan politik (Rahmawan, Mahameruaji & Janitra, 2020), termasuk pelurusan informasi oleh tokoh politik yang menjadi anggota legislatif.

Pada era kebiasaan baru, norma, nilai, dan gagasan orang telah berubah. Perilaku dalam interaksi dengan orang lain dan dengan lingkungannya. Bahkan melanjutkan aktivitas sehari-hari, namun ada sesuatu yang baru harus dilakukan oleh setiap orang, yaitu mengubah perilaku dan kebiasaannya saat ini. Salah satunya adalah lebih memanfaatkan interaksi dan komunikasi secara virtual melalui sosial media, termasuk oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya kepada masyarakat.

Penyelenggara pemerintah dan masyarakat membentuk pengabdian melalui hubungan. Sadar akan pentingnya partisipasi publik, pemerintah membuat masyarakat lebih aktif berpartisipasi dalam proses tinjauan kebijakan interaktif. Popularitas platform media sosial semakin mendorong perkembangan pemerintah - Kemitraan sipil dan membantu membentuk praktik pemerintah kami dan bahkan kebijakan yang tentunya memengaruhi kepentingan bersama dari seluruh pemangku kepentingan.

Praktik komunikasi oleh anggota legislatif, telah menggunakan media sosial secara khusus, segera dan efektif menjalin komunikasi sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada konstituen sebagai inisiatif pemerintah untuk membantu menahan Penyebaran penyakit virus COVID-19. Tentu saja interaksi yang sering antara pemerintah dan masyarakat dapat menghasilkan tanggapan langsung.

Penggunaan digital oleh pemerintah tidak hanya berkembang namun tampaknya akan menjadi fasilitas baru yang memenuhi kebutuhan jangka panjang untuk memfasilitasi kehidupan publik juga mempengaruhi kegiatan tata kelola publik yang ada. Perluasan platform Melengkapi layanan publik sehingga menjadi infrastruktur (Helmond, Nieborg & van der Vlist, 2019). Platform digital ini biasanya menghasilkan efek jaringan yang sangat besar, akibatnya dampak dari acara sosial apa pun di

platform digital mungkin saja terjadi kemudian diperkuat karena efek jaringan, dan batas-batas setiap topik tidak jelas, sehingga membuat sosial media dalam menjalankan fungsi pemerintah lebih menantang.

Sejak pandemi terjadi perubahan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, menjadikan terbukanya kesempatan berpartisipasi dalam urusan publik sebagai badan pembuat keputusan dan pengatur kolektif melalui akses sesuai permintaan dan akses frekuensi tinggi, komunikasi anggota legislatif menjadi lebih dan lebih efisien Interaksi dan respons cepat berbeda dari komunikasi pemerintah melalui sosial media.

Semasa pandemi, pemerintah cenderung menggunakan media sosial daripada media tradisional. Penggunaan platform sosial media dengan basis video pendek dan foto sangat menonjol digunakan oleh pemerintah dalam menjalink komunikasi pada masa reses. Sebagai Format media sosial yang hidup, video pendek dapat meningkatkan keefektifan dan intuisi masyarakat dalam menangkap pesan yang ingin disampaikan pemerintah melalui media sosial. Berbagai jenis *platform* media sosial disampaikan oleh pemerintah salah satunya melalui anggota legislatif yang menggunakan sosial media lebih signifikan meningkat pada masa pandemi.

Ada kelebihan dalam penggunaan sosial

media dalam komunikasi pemerintah, lebih mudah bagi pemerintah dan masyarakat serta pihak lain yang memiliki kepentingan untuk bernegosiasi dan mencapai sebuah konsensus. Dengan membuat, menonton, dan berbagi video pendek dan foto. Selain meningkatkan Efektivitas pesan yang disematkan dalam video pendek, pesan yang lebih jelas bisa. Umpan balik informasi lebih lanjut, ini merupakan saluran penting untuk informasi lebih lanjut. Biasanya, transmisi informasi dan warga negara *platform* video pendek tepat waktu dan efektif. Misalnya, ada gambar dan video di sosial media yang ditemukan membantu mempromosikan kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk menyelesaikan masalah pada daerah tersebut. Secara khusus, warga bisa lebih memahami niat pemerintah setelah menonton video, berperilaku tepat dan berpartisipasi aktif Bantuan untuk mengekang aktivitas COVID-19.

Masyarakat dan pemangku kepentingan harus berpartisipasi dalam tata kelola sosial secara lebih aktif dan bertanggung jawab. Platform digital memberikan lebih banyak peluang pemerintah untuk berinteraksi dengan mereka. Pemerintah dan informasi atau umpan baliknya juga sangat penting untuk pembuatan kebijakan. seperti itu Interaksi dapat membantu membangun pemerintahan yang lebih transparan dan responsif, dan menghasilkan

lebih banyak penilaian rasional dan ilmiah tentang kemungkinan eksternalitas negatif dari perilaku masyarakat. Misalnya, selama wabah COVID-19, tidak memakai masker atau bersosialisasi serta pelaksanaan kunjungan pemerintah yang berkurang sehingga hanya dapat berkomunikasi melalui sosial media yang digunakan sebaik mungkin oleh anggota legislatif.

Popularitas Internet yang tinggi dan perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah menjadikan internet sebagai sumber informasi diberbagai bidang termasuk politik, para aktor politik dapat berkomunikasi melalui sosial media dan masyarakat dapat secara terbuka membaca, berkomentar, berbagi, dan memperoleh informasi politik serta penjalanan fungsi pemerintah dari media sosial.

SIMPULAN

Pada penelitian ini terlihat jelas bahwa anggota legislatif menggunakan akun sosial media berinteraksi atau mengirim pesan kepada masyarakat luas tentang kegiatan politik untuk berkomunikasi secara terbuka dengan publik dengan pesan politik yang dikirim melalui akun sosial media mengundang komunitas untuk berpartisipasi memberikan dukungan dan komentar serta kritik. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, media sosial bersifat interaktif, memungkinkan publik memberikan

tanggapan langsung kepada kegiatan politik lembaga legislatif. Aktor politik dapat melihat bagaimana umpan balik dapat berupa respon positif dan negatif.

Penggunaan sosial media dalam komunikasi anggota legislatif, lebih mudah bagi aktor politik dan masyarakat serta pihak lain yang memiliki kepentingan untuk bernegosiasi dan mencapai sebuah consensus. Dengan membuat, menonton, dan berbagi video pendek dan foto. Selain meningkatkan efektivitas pesan yang disematkan dalam video pendek, pesan yang lebih jelas bisa. Umpan balik informasi lebih lanjut, ini merupakan saluran penting untuk informasi lebih lanjut. Biasanya, transmisi informasi dan warga negara video pendek tepat waktu dan efektif. Misalnya, ada gambar dan video di sosial media yang ditemukan membantu mempromosikan kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk menyelesaikan masalah pada daerah tersebut. Secara khusus, masyarakat bisa lebih memahami niat pemerintah setelah menonton video, berperilaku tepat dan berpartisipasi aktif bantuan untuk mengurangi perkembangan angka COVID-19.

Pada penggunaan sosial media untuk berkomunikasi dengan publik, peneliti menyarankan informasi yang disampaikan dengan sasaran informasi diklasifikasikan dengan jelas sehingga dapat menentukan

sosial media jenis apa yang akan digunakan. Perbedaan karakteristik khalayak pada setiap sosial media perlu menjadi tolak ukur agar pesan tersampaikan dan mendapatkan *feedback* yang sesuai atas kegiatan anggota legislatif yang disampaikan.

Kemudian, keberlangsungan penggunaan media sosial sebagai media komunikasi oleh aktor politik untuk mengelola kepercayaan masyarakat yang akan berpengaruh pada reputasi pemerintah perlu dirancang dan disusun demi keberlanjutannya semasa era kebiasaan baru pasca pandemi. Sosial media memudahkan dan menghemat pengeluaran negara daripada pengkomunikasian menggunakan media konvensional atau bahkan komunikasi langsung yang tidak bersifat luas dan memiliki keterbatasan ruang dan waktu. Penggunaan sosial media untuk komunikasi anggota legislatif perlu dipertimbangkan untuk terus digunakan sebagai salah satu media komunikasi pemerintah kepada publik yang dapat dioptimalkan penggunaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshari, F., & Prastya, N. M. (2014). *Media sosial sebagai sarana branding politisi (Studi Terhadap Akun Media Sosial Presiden Susilo Bambang Yudhoyono)*.
- Criado, J. I., Sandoval-Almazan, R., & Gil-Garcia, J. R. (2013). Government innovation through social media. *Government Information Quarterly*, 30(4), 319–326.

- <https://doi.org/10.1016/j.giq.2013.10.003>
- Dida, S., Hafiar, H., Kadiyono, A. L., & Lukman, S. (2021). Gender, education, and digital generations as determinants of attitudes toward health information for health workers in West Java, Indonesia. *Heliyon*, 7(1). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e05916>
- Engkus, Hikmat, & Saminnurahmat, K. (2017). Perilaku narsis pada media sosial di kalangan remaja dan upaya penanggulangannya. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 20(2), 121–134. <https://doi.org/10.20422/jpk.v20i2.220>
- Haro-de-Rosario, A., Sáez-Martín, A., & del Carmen Caba-Pérez, M. (2018). Using social media to enhance citizen engagement with local government: Twitter or Facebook? *New Media and Society*, 20(1), 29–49. <https://doi.org/10.1177/1461444816645652>
- Hartiana, T. I. P., Setyarinata, A. W., & Nugraheni, Y. (2020). Citra politik Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo di media sosial. *PProfesi Humas*, 4(2), 155. <https://doi.org/10.24198/prh.v4i2.21319>
- Helmond, A., Nieborg, D. B., & van der Vlist, F. N. (2019). Facebook's evolution: development of a platform-as-infrastructure. *Internet Histories*, 3(2), 123–146. <https://doi.org/10.1080/24701475.2019.1593667>
- Hong, S., Katerattanakul, P., & Joo, S. J. (2008). Evaluating government website accessibility: A comparative study. *International Journal of Information Technology and Decision Making*, 7(3), 491–515. <https://doi.org/10.1142/S0219622008003058>
- Indriani, S. S., & Prasanti, D. (2020). Analisis konvergensi simbolik dalam media sosial youth group terkait kasus COVID-19 di Indonesia. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 8(2), 179. <https://doi.org/10.24198/jkk.v8i2.27271>
- Jaya, P. H. I. (2017). Distorsi Komunikasi Pembangunan Pemerintahan Presiden Jokowi di Media Sosial. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 14(2), 259–276.
- Juditha, C. (2015). Political marketing dan media sosial (studi political marketing capres RI 2014 melalui facebook). *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 19(2), 225–242. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199230952.003.0043>
- Kietzmann, J. H., Hermkens, K., McCarthy, I. P., & Silvestre, B. S. (2011). Social media? Get serious! Understanding the functional building blocks of social media. *Business Horizons*, 54(3), 241–251. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2011.01.005>
- Limilia, P., & Pratamawaty, B. B. (2020). Google Trends and information seeking trend of covid-19 in Indonesia. *Jurnal ASPIKOM*, 5(2), 188. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v5i2.741>
- Mudrikah, I. M. (2020). Political Branding Politisi Perempuan di Instagram : Kasus Pada Tsamara Amany Alatas. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 5(2), 29–39.
- Nazir, M. (1998). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Pamungkas, S. (2013). Potensi pengembangan aplikasi multimedia sebagai media komunikasi persuasif di sosial media. *Jurnal Sosial Humaniora*, 6(1), 75–93.
- Permatasari, N., & Trijayanto, D. (2017). Motif eksistensi melalui penggunaan hashtag (#ootd) di media sosial instagram motive of existence in hashtag usage (#ootd) in sosial media instagram. *PROMEDIA*, 2, 252–273.
- Petrovici, M. A. (2014). E-Public relations:

- impact and efficiency. a case study. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 141(April), 79–84. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.05.015>
- Putra, N. A. (2017). Literasi media sosial humas pemerintah daerah. *INFORMASI Kajian Ilmu Komunikasi*, 47(2).
- Rahmawan, D., Mahameruaji, J. N., & Anisa, R. (2019). Pengembangan konten positif sebagai bagian dari gerakan literasi digital. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 7(1), 31. <https://doi.org/10.24198/jkk.v7i1.20575>
- Rahmawan, D., Mahameruaji, J. N., & Janitra, P. A. (2020). Strategi aktivisme digital di Indonesia: aksesibilitas, visibilitas, popularitas dan ekosistem aktivisme. *Jurnal Manajemen Komunikasi*, 4(2), 123. <https://doi.org/10.24198/jmk.v4i2.26522>
- Rohman, R. E., & Retnasary, M. (2020). Penggunaan media sosial twitter masyarakat di Kota Bandung sebagai media untuk memperoleh informasi mengenai new normal dalam Akun @ humasjabar. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 5(2), 18–28.
- Rusmulyadi, & Hafiar, H. (2018). Dekonstruksi Citra Politik Jokowi dalam Media Sosial. *PRofesi Humas*, 3(1), 120–140.
- Subekti, P., Hafiar, H., & Bakti, I. (2020). Penggunaan instagram oleh badan penanggulangan bencana daerah untuk mengoptimalkan destination branding. *PRofesi Humas*, 4(2), 174–192.
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r&d*. Bandung: Alfabeta.
- Sumartono. (2019). Politisi dan pemanfaatan media sosial. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Bisnis*, 5(1), 77–95.
- Venus, A., Octavianti, M., Karimah, K. El, & Arifin, H. S. (2020). *Komunikasi krisis Forum Ekonomi Kreatif Kabupaten Bandung Barat menghadapi pandemi COVID-19 Regency Dealing COVID-19 Pandemic*. 5(1), 117–134.